

**ANALISIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN TAHUN 2019-2024**

**SKRIPSI**

*Digunakan untuk mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

**Oleh :**

**RAHMA RAMADHANI**

**1910832001**



**Dosen Pembimbing**

- 1. Drs. Tamrin M.Si**
- 2. Dr. Indah Adi Putri, M.IP**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2023**

## ABSTRAK

Berbicara mengenai hak dan kepentingan perempuan perlu dilakukan karena hal ini penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara, adil, dan berkelanjutan. Masalah yang peneliti temukan ialah DPRD Padang Pariaman periode sekarang tidak memiliki anggota legislatif perempuan, sehingga peraturan daerah mengenai kepentingan perempuan juga tidak disuarakan. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana keterwakilan terhadap perempuan dalam DPRD Padang Pariaman disuarakan tanpa adanya profil perempuan di lembaga legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini teori yang digunakan yakni teori Representasi Perempuan dari Judith Squires dengan melihat tiga elemen (*microcosm*, *symbolic* dan *principal agent*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada elemen *microcosm*, peneliti menyimpulkan bahwa kepentingan perempuan disuarakan oleh DPRD dalam produk Kabupaten Layak Anak dimana produk hukum ini masih dirapatkan dalam Propemperda. Di elemen *symbolic*, laki-laki di DPRD Padang Pariaman masih bisa dikatakan menjadi profil dalam mengatasi persoalan perempuan. Hal ini terbukti dengan adanya program-program Dinas Sosial yang didanai oleh DPRD yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2022. Pada elemen *principal agent* atau perwakilan dijelaskan bahwa DPRD mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perempuan Padang Pariaman salah satunya KPPI yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman.

**Kata Kunci : Keterwakilan, DPRD, Kepentingan Perempuan**

## ABSTRACT

Discussing women's rights and importance is crucial for creating a more equitable, just, and sustainable society. The research finds that the current legislative body of DPRD (Regional People's Representative Council) Padang Pariaman does not have female representatives, leading to insufficient representation of women's interests through local regulations. This study aims to describe and analyze how women's representation within DPRD Padang Pariaman has been lacking without any female profiles present in the legislative institution. Using a qualitative approach with case study methodology, this research employs Judith Squires "Theory of Women Representation", focusing on three elements: microcosm, symbolic, and principal agent. The findings indicate that in the microcosm element, women's concerns were somewhat represented by DPRD through the "Layak Anak" legal product, which still exists under Propemperda. In the symbolic element, male figures remain prominent in addressing women's issues; this is evident from social welfare programs funded by DPRD, as outlined in Local Regulation Number 4 Year 2022. Lastly, in the principal agent or representative aspect, DPRD supports and endorses activities initiated by women in Padang Pariaman, including the establishment of KPPI (Women's Empowerment Group), overseen by the Social Affairs Department of Padang Pariaman District.

**Keywords: Women's Interests, DPRD, Women's Representation.**